

## BAB II

### PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI MYANMAR

Pada bab ini akan diuraikan tentang kondisi Myanmar yang didalamnya meliputi pembahasan tentang Myanmar, Junta Militer Memimpin Myanmar. Selain itu akan dibahas tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Myanmar, serta tentang lembaga-lembaga yang menangani masalah pelanggaran HAM di dunia.

#### A. Kondisi Myanmar

##### 1. Myanmar

Persatuan Myanmar (juga dikenal sebagai Burma) adalah sebuah negara di Asia Tenggara. Negara seluas 680 ribu km<sup>2</sup> ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1962. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa pada akhir tahun 2008.<sup>33</sup>

Wilayah negara Myanmar dibagi menjadi tujuh negara bagian (*pyine*) dan tujuh divisi (*yin*). Divisi mayoritas dihuni etnis Bamar, sementara negara bagian mayoritas dihuni etnis-etnis minoritas tertentu. Setiap negara bagian dan divisi kemudian dibagi lagi menjadi distrik-distrik.

**Tabel 2.1**  
**Pembagian Wilayah Myanmar**

Negara Bagian	Divisi
Negara Bagian Chin	Divisi Irrawaddy
Negara Bagian Kachin	Divisi Bago
Negara Bagian Kayin (Karen)	Divisi Magway
Negara Bagian Kayah (Karenni)	Divisi Mandalay
Negara Bagian Mon	Divisi Sagaing
Negara Bagian Rakhine (Arakan)	Divisi Tanintharyi
Negara Bagian Shan	Divisi Yangon

Sumber: "Myanmar," dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar>, diakses tanggal 1 Oktober 2011.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat tujuh negara bagian yang ada di Myanmar. Ketujuh negara bagian tersebut adalah negara bagian Chin, Kachin, Kayin (Karen), Kayah (Kiarenni), Mon, Rakhine (Arakan), dan Shan. Divisi yang ada di Myanmar adalah divisi Irrawaddy, Bago, Magway, Mandalay, Sagaing, Tanintharyi, dan Yangon.

Di Myanmar terdapat etnis yang heterogen. Penjelasan yang berkaitan dengan etnis tersebut terurai dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Etnis yang Ada di Myanmar**

Nama Etnis	Karakteristik
Bamar atau Burma	Dua pertiga dari total warga Myanmar. Beragama Budha, menghuni sebagian besar wilayah negara kecuali pedesaan.
Etnis Karen	Suku yang beragama Budha, Kristen atau paduannya. Memperjuangkan otonomi selama 60 tahun. Menghuni pegunungan dekat perbatasan dengan Thailand.

Etnis Shan	Etnis yang beragama Budha yang berkerabat dengan etnis Thai.
Etnis Arakan	Juga disebut Rakhine, umumnya beragama Budha dan tinggal di perbukitan di Myanmar barat.
Etnis Mon	Etnis yang beragama Budha yang menghuni kawasan selatan dekat perbatasan Thailand.
Etnis Kachin.	Kebanyakan beragama Kristen. Mereka juga tersebar di Cina dan India.
Etnis Chin	Kebanyakan beragama Kristen, menghuni dekat perbatasan India.
Etnis Rohingya.	Etnis Muslim yang tinggal Arakan, utara Rakhine, banyak yang telah mengungsi ke Bangladesh atau Thailand.

Sumber: "Sikap Politik terhadap Junta Militer Myanmar," dalam [http://www.gmnisurabaya.org/sikap\\_politik\\_terhadap\\_junta\\_militer\\_myanmar/](http://www.gmnisurabaya.org/sikap_politik_terhadap_junta_militer_myanmar/), diakses tanggal 6 Oktober 2011.

Penduduk Myanmar memiliki beberapa agama yang dianut oleh tiap-tiap individunya. Diantara agama-agama yang dianut oleh penduduk di Myanmar, agama Budha merupakan agama mayoritas penduduk di Myanmar. Selain itu, agama lain yang dianut oleh penduduk Myanmar adalah Kristen, Islam, dan lain-lain. Persentase jumlah penduduk di Myanmar berdasarkan agama yang dianut tampak pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Persentase Jumlah Penduduk di Myanmar**  
**Berdasarkan Agama**

Agama yang Dianut	Persentase
Budha	89%
Kristen	4%
Islam	4%
Lain-lain	3%

Sumber: "Myanmar" dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar>, diakses tanggal 6

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Myanmar bernama Burma. Ibu kota dari Myanmar pada awalnya berada di Yangon, namun pada tanggal 7 November 2005 dipindah ke Naypyidaw. Mayoritas agama yang dianut masyarakat Myanmar adalah Budha.

## **2. Junta Militer Memimpin Myanmar**

Istilah Junta Militer berasal dari bahasa Spanyol yang berarti dewan militer. Menurut *Oxford Concise Dictionary of Politics*<sup>34</sup>, Junta mengacu pada abad 16 saat komite konsultasi pemerintah yang dijabat oleh para jenderal. Pada era modern sekarang istilah ini mengacu kepada dewan militer yang menguasai sebuah negara menyusul kudeta, sebelum konstitusi baru berlaku. Di Amerika Latin biasanya diketuai oleh Panglima Angkatan Bersenjata yang membawahi ketiga angkatan yakni darat, laut dan udara. Begitu juga di Thailand dan Pakistan.

Persatuan Myanmar yang juga dikenal sebagai Burma adalah sebuah negara di Asia Tenggara dengan luas wilayah 680 ribu km<sup>2</sup> dipimpin oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1962. Myanmar merupakan sebuah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa. Ibukota Myanmar terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan Junta Militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Bull, Victoria, *Oxford Concise Dictionary of Politics*. Oxford University Press, 2008.

<sup>35</sup> "Parlemen Serukan Penghentian Pelanggaran HAM di Myanmar," dalam

Pada tahun 1989, tepatnya tanggal 18 juni, terjadi perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar. Perubahan tersebut dilakukan agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara Myanmar. Meskipun demikian, perubahan nama menjadi Myanmar ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengakui hak setiap negara untuk menentukan nama negaranya, menggunakan nama Myanmar sebagai pengganti sebutan negara Burma, begitu pula dengan Perancis dan Jerman.

Di Jerman, kementerian luar negeri menggunakan Myanmar, tetapi hampir seluruh media yang ada di Jerman masih tetap menggunakan sebutan Burma sedangkan mayoritas media besar seperti *The New York Times*, CNN dan *Associated Press* menggunakan Myanmar. Meskipun PBB mengakui perubahan nama Burma menjadi Myanmar, tetapi ada juga beberapa negara Eropa seperti Inggris dan Irlandia yang tidak mengakui legitimasi kekuasaan Junta Militer tetap menggunakan "Burma" untuk merujuk kepada negara tersebut. Hal ini sama dengan pemerintah AS, yang tidak mengakui legitimasi kekuasaan Junta Militer, dimana AS tetap menggunakan sebutan Burma.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Junta Militer mulai berkuasa di Myanmar pada tahun 1988. Junta Militer saat itu melakukan kudeta sehingga berhasil merebut kekuasaan pemerintah Burma saat itu. Hingga kini (tahun 2011) Junta Militer masih berkuasa di Myanmar.

---

<sup>36</sup> "Penindasan HAM di Myanmar Masih Berlangsung," dalam <http://www.kompas.com/t/0000252422.html>, diakses tanggal 6 Oktober 2011

## B. Pelanggaran-Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ada di Myanmar

Pada masa Junta Militer Memimpin Myanmar, Junta Militer sering melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Berikut merupakan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang telah dilakukan Junta Militer di Myanmar:

**Tabel 2.4**  
**Pelanggaran HAM yang Telah Dilakukan Junta Militer**

Bentuk Pelanggaran	Keterangan
Melakukan tindak kekerasan	Berbagai tindak kekerasan dilakukan Junta Militer, seperti dengan melakukan penganiayaan, pemukulan, bahkan pembunuhan. Terbukti pada saat 8 Agustus 1988 Junta Militer menewaskan 3.000 aktivis mahasiswa.
Mengekang kebebasan mengungkapkan ide	Kebebasan mengungkapkan ide dilakukan dengan merusak media yang digunakan oleh wartawan untuk mencari berita bahkan menganiaya wartawan. Buktinya adalah memerintahkan aparat untuk memukul siapa saja yang membawa kamera video bahkan membunuh Wartawan kantor berita APF Jepang, Kenji Nagai saat sedang mengambil gambar aksi Junta Militer.
Mengekang kebebasan mendapatkan informasi	Junta Militer membendung arus informasi dari dalam negeri ke seluruh penjuru dunia. Buktinya adalah melakukan perusakan kabel bawah air untuk menghentikan jaringan internet.
Menekan etnis minoritas	Dilakukan dengan menekan etnis Rohingya.

Sumber: "Menanti Ratifikasi "ASEAN CHARTER"," dalam <http://beritasore.com/2007/11/23/menanti-ratifikasi-asean-charter/>, diakses tanggal 6 Oktober 2011.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Junta Militer adalah melakukan tindak kekerasan, mengekang kebebasan mengungkapkan ide, serta mengekang kebebasan mendapatkan informasi. Pada 1988 terjadi gelombang demonstrasi besar menentang

pemerintahan Junta Militer. Gelombang demonstrasi ini berakhir dengan tindak kekerasan yang dilakukan tentara terhadap para demonstran. Pada saat aksi demonstrasi terjadi, sebanyak lebih dari 3000 orang terbunuh. Ini merupakan bukti nyata bahwa Junta Militer telah melakukan pelanggaran HAM di Myanmar.<sup>37</sup>

Bentuk pelanggaran HAM lainnya yang telah dilakukan Junta Militer di Myanmar adalah mengekang kebebasan mengungkapkan ide. Hal itu nampak dari tekanan yang dilakukan oleh Junta Militer terhadap para wartawan. Junta Militer memberikan perintah kepada para aparat untuk memukul siapa saja yang membawa kamera video. Junta Militer tidak ingin ada individu yang berani mengungkapkan idenya atau memberikan tanggapan berkaitan dengan segala tindakan yang telah dilakukan Junta Militer. Junta Militer juga tidak segan-segan melakukan penganiayaan atau membunuh para wartawan yang berusaha mengungkap tindak pelanggaran yang dilakukan Junta Militer. Contoh nyata tindakan tegas yang dilakukan Junta Militer terhadap wartawan adalah membunuh Wartawan kantor berita APF Jepang, Kenji Nagai saat sedang mengambil gambar aksi Junta Militer.

Bukti lain yang menunjukkan bahwa Junta Militer melakukan pelanggaran HAM dengan mengekang kebebasan mengungkapkan ide adalah tidak diakuinya

hasil pemilu 1990. Pada pemilu 1990 partai pro demokrasi pimpinan Aung San Sun

Kyi memenangi 82 persen suara namun hasil pemilu ini tidak diakui rezim militer yang berkuasa.<sup>38</sup>

Gelombang protes Myanmar justru menguat sejak dimulainya masa pemerintahan militer Jenderal Ne Win. Tahun 1988, gelombang protes massa Myanmar ini melibatkan pelajar, pejabat sipil, pekerja hingga para biksu Budha. Protes hadir saat Ne Win menggunakan tentara bersenjata demi kudeta militer. *The State Peace and Development Council's* (SPDC's) Myanmar mengajukan tuntutan yang populer untuk mereformasi pemerintahan menjadi neo-liberal. Tuntutan reformasi ini terutama berlaku untuk ekonomi, termasuk saat pemerintah Myanmar menarik subsidi BBM.

Protes massa Myanmar memang tak seramai Amerika yang liberal. Dimana-mana rezim militer masih memegang kendali sosial. *Asia Times* mencatat, gerakan protes umumnya mulai dalam jumlah kecil dan tersebar. Beberapa protes kecil dan damai terus berkelanjutan di ibukota Yangon. Namun kemarahan publik ini dapat berubah menjadi “efek bola salju” dan menjadi gerakan massa besar-besaran. Salah satunya yang terjadi di Pakkoku. Setelah bola salju ini pecah, maka perlahan akan kembali menggumpal.

Beberapa hari setelah kejadian Pakkoku, 500 biksu kembali berbaris damai di Yangon, Myanmar. Layaknya biksu, *New York Times* mencatat gerakan ini malah

---

<sup>38</sup> “Utusan Khusus PBB Akan Diskusikan HAM di Myanmar,” dalam



berdoa untuk kedamaian dan keselamatan setelah peristiwa Pakkoku. Gerakan dalam protes bukan hanya terjadi dari satu pihak saja. Pemerintah Myanmar juga menyikapinya dengan *Union Solidarity and Development Association* (USDA). USDA tercatat kerap bergabung dalam gelombang protes ini. Organisasi propemerintah ini tercatat bahkan ikut terlibat dalam upaya pembunuhan Suu Kyi di tahun 2003. Meski gagal, aksi tersebut menjatuhkan korban simpatisan *National League for Democracy* (NLD) sebagai gantinya.

Anggota kelompok ini (USDA) dilatih khusus untuk mengontrol massa dan mengubah protes menjadi aksi kekerasan,” kata seorang Diplomat barat di Yangon pada Asia Times. Dunia Barat mencurigai gerakan ini berada dalam sayap yang sama dengan intelejen Myanmar. Apalagi, setiap aksi protes yang terjadi sangat sulit untuk diliput oleh para jurnalis, termasuk jurnalis internasional. Rekrut anggota juga dicurigai berasal dari para kriminal. Seiring bertambahnya anggota USDA, sekurangnya 600 kriminal juga dilepaskan dari Penjara Yangon. Hingga kini anggota USDA diperkirakan mencapai 2000 orang.

USDA berfungsi menyaingi kelompok pelajar dan biksu Budha yang vokal dalam aksi protes. Apalagi secara khusus aktivis Myanmar telah memiliki organisasi protes massanya sendiri. Organisasi *88 Generation Student* yang biasa disebut dengan *Generation 88* ini didirikan oleh penyair internasional asal Myanmar Ming Ko Naing dan Ko Ko Gyi. Keduanya mendirikan organisasi ini setelah dibebaskan dari 14 tahun penjara dan cukup populer di mata masyarakat Myanmar. Meski berlabel pelajar

*Generation 88* kerap bekerjasama dengan para pekerja, sipil hingga para biksu Budha.

“Kami percaya tidak satupun warga Myanmar yang rela menerima aksi kekerasan politik Junta Militer,” kata salah satu pemimpin *Generation 88* Htay Kywe pada *Asia Time*. Adanya setiap protes massa Myanmar hampir dapat dipastikan *USDA* dan *Generation 88* berperan didalamnya.<sup>39</sup>

Demostrasi terjadi di beberapa kota termasuk di Rangoon. Aktivis mahasiswa bersama biksu memimpin gerakan. Namun gerakan ini diakhiri dengan pembantaian pada 8 Agustus 1988, atau dikenal 8.8.88, di mana sekitar 3.000 aktivis tewas. Saat menyampaikan pengunduran dirinya, Ne Win mengatakan “Jika tentara diturunkan menghadapi pengunjuk rasa mereka akan menggunakan senjatanya dengan diarahkan langsung membidik sasaran. Tentara Myanmar tidak mengenal tradisi ”menembak ke udara”.<sup>40</sup>

Pelanggaran ketiga yang dilakukan Junta Militer adalah mengekang kebebasan mendapatkan informasi. Junta Militer berusaha untuk membendung arus informasi dari dalam negerinya agar masyarakat internasional tidak mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Junta Militer. Junta Militer melakukan perusakan kabel bawah air untuk menghentikan jaringan internet agar masyarakat

---

<sup>39</sup> “Mengapa Junta Militer Burma Bisa Bertahan Lama Di Panggung Kekuasaan,” dalam

tidak mendapatkan informasi berkaitan dengan kegiatan yang Junta Militer lakukan di Myanmar.

Pelanggaran HAM yang terjadi selama bertahun-tahun dimana kebebasan bersuara dikekang, pers ditekan dengan berbagai cara sehingga efeknya mengakibatkan banyak rakyat yang menderita baik secara sosial ekonomi dan politik, kesenjangan begitu mencolok. Keadaan seperti ini telah terjadi di Myanmar selama lebih dari empat puluh lima tahun lamanya. Pada tahun 1988, pelanggaran HAM di Myanmar semakin memburuk terbukti dengan pihak militer melakukan penyerangan terhadap para pengunjuk rasa. Sebanyak lebih dari 3.000 orang menerima pembantaian yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar. Kebebasan pers dibelenggu, media massa dimonopoli oleh Junta, sehingga akses informasi serta pemberitaan hanya menjadi satu arah dimana seolah-olah keberadaan di Myanmar hari ini tidak terjadi apa-apa.

Pelanggaran HAM yang selanjutnya adalah penekanan yang dilakukan Junta Militer terhadap etnis minoritas. Perjuangan muslim di Myanmar dalam melakukan unjuk rasa dan protes terhadap Junta Militer terus terjadi. Etnis muslim yang paling utama dalam melakukan perlawanan berasal dari etnis Rohingya. Etnis Rohingya terus berjuang melawan berbagai pembatasan dan penggebirian hak-hak dasar etnis mereka sebagai warga negara Myanmar.

Berdasarkan *Amnesty Internasional* (AI) yang berbasis di London, warga minoritas Rohingya kerap dinaksa kerja sebagai buruh di jalan-jalan dan di kamp-

kamp militer. Selain itu, etnis Rohingya juga dibebani dengan berbagai bentuk pajak dan pembatasan di sektor keuangan dan perkawinan. Junta Militer sering merampas tanah-tanah dan rumah-rumah etnis Rohingya dihancurkan. Keadaan yang demikian mengakibatkan warga negara Myanmar menderita sedangkan Junta Militer tidak memiliki rasa kepedulian sedikitpun.

Etnis Rohingya telah tinggal di Arakan, sebuah negara bagian di Myanmar, sejak abad ke-7 M, sedangkan Junta Militer Myanmar menyatakan etnis Rohingya merupakan pendatang yang di tempatkan oleh penjajah Inggris dari Bangladesh. Kenyataannya, secara fisik etnis Rohingya memiliki kesamaan fisik dengan orang Bangladesh karena merupakan keturunan campuran orang Bengali, Persia, Mongol, Turki, Melayu, dan Arab. Kebudayaan Rohingya sedikit berbeda dari kebanyakan orang Myanmar, termasuk dari segi bahasa yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab, Parsi, Urdu, dan Bengali.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berbagai pelanggaran HAM dilakukan oleh Junta Militer di Myanmar. Pelanggaran tersebut antara lain adalah melakukan tindak kekerasan, mengekang kebebasan mengungkapkan ide, serta mengekang kebebasan mendapatkan informasi.

### **C. Lembaga yang Menangani Masalah Pelanggaran HAM di Dunia**

Menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara-negara sepakat untuk membentuk suatu organisasi dunia yang dapat mencegah konflik selanjutnya dan

membantu membangun dunia yang lebih baik. Organisasi tersebut dinamakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dibentuk pada tahun 1945. Ada tiga tujuan utama PBB:<sup>41</sup>

1. Menjamin perdamaian dan keamanan dunia.
2. Memajukan pembangunan sosial dan ekonomi.
3. Menjamin pengakuan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia.

Untuk mencapai tiga tujuan besar tersebut, PBB menyusun jaringan organisasi yang besar dan rumit meliputi seluruh aspek dari kegiatan manusia. Mengingat PBB adalah organisasi yang besar dan rumit, penting sekali untuk terbiasa dengan struktur organisasi tersebut. Badan tertinggi PBB adalah Sidang Umum (*General Assembly*), dimana tiap-tiap negara anggota memiliki satu suara. Sidang Umum PBB (SU PBB) dilaksanakan setiap tahun dari bulan September hingga Desember di kantor pusat PBB di New York untuk mengevaluasi semua kegiatan PBB. Jika SU adalah badan tertinggi maka Dewan Keamanan (*Security Council*) adalah badan yang paling berkuasa di PBB. Sesuai dengan namanya, Dewan Keamanan berurusan dengan isu-isu yang terkait dengan persoalan perdamaian dan keamanan. DK memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan yang mengikat anggota-anggota PBB, misalnya keputusan untuk melakukan sanksi perdagangan atas suatu negara. Mengingat DK tidak terlibat langsung dalam masalah-masalah hak asasi manusia, maka sulit bagi DK untuk juga terlibat dalam masalah-masalah yang terkait dengan

---

<sup>41</sup> "Masyarakat Adat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa: Sebuah Tinjauan", dalam [http://dca.or.id/AMAN/publikasi/IDN\\_IDP/LEMBARI.pdf](http://dca.or.id/AMAN/publikasi/IDN_IDP/LEMBARI.pdf) diakses tanggal 4 Oktober 2011

masyarakat adat. Terdapat sejumlah besar staf resmi atau pegawai sipil yang bekerja untuk PBB. Pelayanan sipil PBB disebut Sekretariat. Pejabat tertinggi PBB adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen). PBB terdiri sejumlah besar badan-badan pendukung yang mencakup permasalahan perdamaian dan keamanan, pelucutan senjata, ekonomi dan pembangunan, lingkungan, hukum, hak-hak asasi manusia, perempuan dan obat-obatan terlarang. Sejumlah badan tersebut berada di bawah naungan Dewan Ekonomi dan Sosial yang biasa disebut dengan ECOSOC yang berkewajiban memberikan laporan kepada Sidang Umum.

PBB juga terdiri dari berbagai organisasi yang memiliki kewenangan sendiri. Beberapa diantaranya disebut Agen-agen Khusus yang menangani masalah-masalah khusus seperti kesehatan, makanan, pendidikan dan komunikasi internasional. Organisasi Agen-agen khusus tersebut diantaranya adalah UNESCO (Organisasi PBB untuk pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya), WHO (Organisasi PBB untuk kesehatan) yang keduanya memiliki kepentingan atas kondisi masyarakat adat. PBB menangani masalah Masyarakat Adat melalui Kantor Komisi Tinggi untuk Hak-Hak Asasi Manusia (OHCHR). Dalam sistem PBB terdapat juga Mahkamah Pengadilan Internasional (biasa disebut sebagai Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice*) yang memiliki peran terbatas dalam pengawasan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Sebagai contoh, beberapa perjanjian tentang hak-hak asasi manusia hanya memungkinkan Mahkamah Internasional mempertimbangkan pertikaian antar pemerintah. Mengingat Mahkamah tersebut hanya menangani kasus

pertikaian antar pemerintah dan tidak menerima pelimpahan kasus dari perorangan, maka sedikit sekali kesempatan masyarakat adat untuk bekerja sama dengan Mahkamah Internasional.

Selain OHCHR PBB juga memiliki Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat (WGIP) yang merupakan Sub Komisi untuk Promosi dan Perlindungan HAM. Terdapat kurang lebih 300 juta masyarakat adat di lebih dari 70 negara di dunia. Masyarakat adat atau *Indigenous Peoples* adalah pewaris dan pelaksana kebudayaan yang unik dan bentuk-bentuk hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan. Masyarakat adat telah mempertahankan sifat-sifat sosial, ekonomi dan politiknya yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya di mana mereka tinggal. Meskipun memiliki perbedaan budaya, berbagai kelompok masyarakat adat di dunia menghadapi permasalahan yang serupa dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagai komunitas yang khas. Masyarakat adat di seluruh dunia telah berupaya untuk memperoleh pengakuan atas identitas, cara hidup dan hak mereka atas lahan-lahan tradisional dan sumber-sumber lainnya. Namun, sepanjang sejarah, hak-hak masyarakat adat telah dilanggar. Masyarakat adat dapat dikatakan adalah kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung dan rentan di dunia saat ini. Komunitas internasional saat ini telah menyadari perlunya diambil langkah-langkah khusus untuk melindungi hal-hak masyarakat adat di dunia.<sup>42</sup>

Berkat upaya-upaya lobi yang dilakukan oleh wakil-wakil masyarakat adat

... .. 20 ... .. hak-hak masyarakat adat mendapat perhatian besar

di PBB dan seluruh komunitas Internasional. Pada tahun 1971, Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok-Kelompok Minoritas, yang terdiri dari 26 orang ahli hak-hak asasi manusia yang independen, menunjuk salah satu anggotanya, Martinez Cobo, sebagai pelapor khusus (*Special Rapporteur*). Martinez Cobo ditugaskan untuk melakukan penelitian menyeluruh mengenai diskriminasi atas masyarakat adat dan membuat rekomendasi tindakan-tindakan untuk menghilangkan diskriminasi tersebut di tingkat nasional dan internasional. Penelitian Martinez Cobo membahas berbagai masalah hak-hak asasi manusia yang mempengaruhi masyarakat adat, termasuk masalah kesehatan, perumahan dan pendidikan. Penelitian tersebut menghimbau para pemerintah untuk menyusun panduan bagi kegiatan-kegiatan menyangkut masyarakat adat berdasarkan penghargaan atas identitas etnik, hak-hak dan kebebasan masyarakat adat. Laporan tersebut menunjukkan perkembangan penting atas problem pengakuan hak-hak asasi manusia yang dihadapi oleh masyarakat adat.

Sebelum penelitian Martinez Cobo diselesaikan, pada 1982, Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat (*Working Group on Indigenous Population* atau WGIP) dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. WGIP, yang merupakan simpul pelaksana (*focal point*) dalam sistem PBB untuk mempromosikan hak-hak masyarakat adat, terdiri dari 5 orang ahli independen yang juga merupakan anggota Sub Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia. Pertemuan WGIP terbuka bagi seluruh wakil wakil masyarakat adat, kelompok masyarakat adat



dan organisasi masyarakat adat. Karena itu, beberapa pertemuan WGIP menjadi pertemuan terbesar HAM yang diselenggarakan oleh PBB. Masyarakat adat dari berbagai penjuru dunia datang untuk berpartisipasi dalam WGIP; masyarakat Aborigin dan penduduk Selat Torres dari Austraria, masyarakat Maori dari Selandia Baru, kelompok masyarakat yang merupakan penduduk asli Amerika baik dari Amerika Utara dan Amerika Selatan, masyarakat Inuit dari Kutub Utara, masyarakat Saami dari Eropa Utara, masyarakat Ainu dari Jepang dan berbagai kelompok masyarakat lainnya dari Asia, Afrika dan negara Federasi Rusia. Melalui pertemuan internasional ini, masyarakat adat menyadari bahwa mereka memiliki pengalaman yang sama dan perjuangan yang sama.

WGIP telah menjadi faktor pemercepat proses (katalisator) untuk berbagai inisiatif yang berhubungan dengan masyarakat adat. Salah satu upaya penting adalah upaya WGIP dalam menyusun rancangan Draft Deklarasi PBB atas hak-hak masyarakat adat bekerja sama pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat adat dan LSM. Draft Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sub Komisi dan dikirim ke Komisi Hak-Hak Asasi Manusia. Komisi kemudian membentuk kelompok kerjanya sendiri pada tahun 1995 untuk mengevaluasi draft tersebut. Sejalan dengan perkembangan waktu, banyak rekomendasi yang dihasilkan untuk melakukan penelitian dan pertemuan para ahli. Ketua WGIP periode 1983-1999, Erica-Irene Daes, telah menghasilkan dua penelitian dalam bidang ini; Pertama berupa sebuah penelitian mengenai

hubungan masyarakat adat dengan wilayahnya. Ketua WGIP tahun 2000, Miguel Alfonso-Martinez, menyelesaikan studi mengenai kesepakatan, perjanjian dan bentuk-bentuk hubungan positif lainnya antara negara dengan masyarakat adat tahun 1999. Ketiga laporan studi tersebut dapat diperoleh di *website* OHCHR. Penelitian-penelitian para ahli dan seminar-seminar memberikan kesempatan untuk melakukan analisa isu-isu baru mengenai hak-hak asasi manusia atau pertanyaan-pertanyaan peka seputar itu dalam konteks yang lebih tidak resmi. Dua pertemuan para ahli, satu mengenai pemerintahan adat pada tahun 1989 dan satunya mengenai hak-hak tanah masyarakat adat pada tahun 1996, sangat berguna untuk berbagi pengalaman-pengalaman positif negara dan membuat rekomendasi untuk kegiatan PBB selanjutnya. Masyarakat adat yang ingin membantu membentuk kebijakan nasional dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di atas dengan memberikan sumbangan informasi, gagasan dan komentarnya.

Saat ini terdapat 16 organisasi masyarakat adat yang memiliki status konsultatif dalam Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Status konsultatif artinya bahwa organisasi tersebut dapat menghadiri dan memberikan kontribusi dalam beragam konferensi internasional dan antar pemerintah. Selain ke 16 organisasi tersebut, terdapat juga ratusan wakil masyarakat adat dan organisasinya yang berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan PBB seperti WGIP. Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat yang berkepentingan dalam isu hak-hak asasi manusia juga membantu mempersiapkan hak-hak masyarakat adat dan mendukung secara aktif perjanjian

perjuangan masyarakat adat. Selain keterlibatan besar masyarakat adat dalam WGIP, masyarakat adat juga semakin menonjol dalam keterlibatannya sebagai pemain dalam panggung dunia. Pada tahun 1989, Kepala Suku Ted Moses, dari Dewan Besar Masyarakat Adat Cree di Canada, merupakan individu masyarakat adat pertama yang dipilih untuk bekerja (*to office*) dalam suatu pertemuan PBB untuk mendiskusikan dampak-dampak diskriminasi rasial dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adat. Sejak itu, jumlah individu masyarakat adat yang memiliki posisi resmi dalam pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan masalah-masalah masyarakat adat semakin meningkat.

Ratusan perwakilan masyarakat adat menghadiri, dan beberapa diantaranya sempat berbicara dalam, Konferensi Dunia Kedua mengenai HAM di Vienna pada bulan Juli 1993. Konferensi tersebut mengakui tanggungjawab seluruh negara anggota PBB untuk menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar masyarakat adat, dan merekomendasikan pertimbangan untuk pembentukan Forum Permanen PBB bagi masyarakat adat. Masyarakat adat juga berpartisipasi dalam konferensi-konferensi dunia, seperti Konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan (Kongres Bumi) di Rio de Janeiro pada tahun 1992, Kongres Dunia mengenai Perempuan di Beijing pada tahun 1995, dan Kongres Sosial pada tahun 1996. Masyarakat adat akan tampil menonjol dalam Konferensi Dunia melawan Rasisme yang diselenggarakan di Durban, Afrika Selatan. Langkah terakhir dalam meningkatkan peran perwakilan masyarakat adat dalam kegiatan-kegiatan PBB

adalah pembentukan Forum Permanen mengenai isu-isu masyarakat adat pada tahun 2000. Forum ini adalah badan penasehat yang memberi laporan kepada Dewan Sosial dan Ekonomi. Forum tersebut terdiri dari 16 anggota ahli, 8 diantaranya diusulkan oleh masyarakat adat.

PBB menetapkan bahwa tahun 1993 sebagai tahun internasional bagi masyarakat adat di dunia. Pada upacara pembukaan di New York, para pemimpin masyarakat adat berbicara di podium Sidang Umum PBB untuk pertama kalinya dalam sejarah PBB. Rigoberta Menchu Tum, seorang suku India Maya, yang pada tahun 1992 mendapat penghargaan Nobeles untuk perdamaian, ditunjuk sebagai Duta *Goodwill* PBB untuk tahun tersebut. Pada tahun 1994, Sidang Umum PBB meluncurkan Dekade Internasional untuk masyarakat adat dunia (1995-2004) untuk meningkatkan komitmen PBB mempromosikan and melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia. Sebagai bagian dari perayaan dekade tersebut, beberapa agen khusus PBB bekerja sama dengan masyarakat adat untuk merancang dan melakukan proyek-proyek kesehatan, pendidikan, perumahan, lapangan kerja, pembangunan dan lingkungan yang mempromosikan dan melindungi masyarakat adat beserta tradisi budaya, nilai-nilai dan praktek kehidupan sehari-hari. Meskipun kesempatan masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam kegiatan PBB semakin bertambah dibandingkan sebelumnya, masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat semakin rumit baik secara politik seperti misalnya menyangkut

Draft Deklarasi, maupun dari secara teknik seperti misalnya untuk isu budaya dan hak milik intelektual.<sup>43</sup>

Pada tahun 2006, PBB membentuk Dewan HAM. Dewan HAM adalah suatu badan PBB yang bertugas menangani sejumlah pelanggaran HAM di berat di dunia. Dewan Hak Asasi Manusia PBB merupakan organisasi penerus dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB di PBB. Pada 15 Maret 2006 Majelis Umum PBB memvoting untuk menciptakan sebuah organisasi hak manusia baru, meskipun ada penentangan dari Amerika Serikat. Dewan Hak Manusia beranggotakan 47 negara ini akan menggantikan Komisi Hak Manusia yang beranggotakan 53 negara yang sekarang. Badan hak manusia yang baru ini disetujui oleh 170 anggota dari dari 190 anggota. Empat negara menentang pembentukan Dewan, yaitu Amerika Serikat, Kepulauan Marshall, Palau, dan Israel) dan tiga negara abstain, yaitu Belarus, Iran, dan Venezuela. Keempat negara yang menentang menyatakan bahwa Dewan baru ini sedikit lebih banyak memiliki kekuasaan dan tidak memiliki penjagaan yang cukup untuk mencegah negara yang melecehkan HAM mengambil kontrol dari Dewan.<sup>44</sup>

Pemilihan untuk menentukan anggota Dewan HAM PBB dilakukan Selasa, 9 Mei 2006, waktu Amerika Serikat di Gedung Markas Besar PBB, New York. Ada 63 negara yang mencalonkan diri untuk bisa duduk di Dewan HAM yang beranggotakan 47 negara. Selain Indonesia, untuk kawasan Asia yang mendapatkan jatah 13 kursi,

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> "Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa," dalam *Law // Justice di era global/Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa* diakses

anggota terpilih lainnya adalah Banglades, Jepang, Malaysia, Pakistan, Korea Selatan, Cina, Jordania, Arab Saudi, dan Sri Lanka. Sementara negara-negara Asia yang gagal terpilih adalah Iran, Irak, Kirgistan, Lebanon, Thailand. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota badan HAM baru PBB mendapatkan dukungan 165 negara dari 191 negara anggota PBB. Dalam pengundian, Indonesia dan India hanya mendapat masa jabatan satu tahun. Sementara Malaysia, Jordania, dan Arab Saudi mendapat masa jabatan tiga tahun.

Dewan HAM yang mulai dibentuk tahun 2006 untuk menggantikan posisi Komisi HAM yang dinilai tidak lagi berimbang dan netral karena banyak dipengaruhi kepentingan-kepentingan politis. Kenggotaan Dewan HAM terbagi dalam tiga periode, yakni satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Untuk kelompok Asia, selain Indonesia dan India, Filipina dan Qatar juga terpilih menjadi anggota Dewan HAM dengan masing-masing mendapatkan 179 dan 170 suara.<sup>45</sup>

Pemilihan 14 anggota Dewan HAM dilakukan melalui dua putaran. Untuk menjadi anggota, masing-masing negara harus mengumpulkan suara mayoritas dari 192 negara, yaitu minimal 97 suara. Terhitung tanggal 20 Juni 2007, para anggota baru Dewan HAM akan bertugas selama tiga tahun untuk memusatkan perhatian kepada masalah pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran berat dan sistematis, memajukan koordinasi efektif serta menerapkan HAM dalam sistem PBB. Secara keseluruhan, anggota Dewan HAM PBB terdiri dari 47 negara. Jika suatu negara

<sup>45</sup> "Menunggu Peran RI Sebagai Anggota Dewan HAM PBB," dalam <http://beritasore.com/2007/05/31/menunggu-peran-ri-sebagai-anggota-dewan-ham-pbb/>, tanggal 11 Oktober 2011. diakses

anggota gagal menerapkan standar tertinggi dalam penghormatan hak asasi manusia, keanggotaan negara yang bersangkutan akan dibatalkan melalui 2/3 hasil pemungutan suara dari para anggota Majelis Umum PBB.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa OHCHR adalah lembaga yang menangani masalah pelanggaran HAM di dunia. Selain OHCHR PBB juga memiliki Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat (WGIP) yang merupakan Sub Komisi untuk Promosi dan Perlindungan HAM. Selanjutnya di tahun 2006, PBB membentuk Dewan HAM.

anggota gagal menerapkan standar tertinggi dalam penghormatan hak asasi manusia, keanggotaan negara yang bersangkutan akan dibatalkan melalui 2/3 hasil pemungutan suara dari para anggota Majelis Umum PBB.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa OHCHR adalah lembaga yang menangani masalah pelanggaran HAM di dunia. Selain OHCHR PBB juga memiliki Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat (WGIP) yang merupakan Sub Komisi untuk Promosi dan Perlindungan HAM. Selanjutnya di tahun 2006, PBB membentuk Dewan HAM.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*